



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-14.KP.03.04 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pengangkatan pertama dan guna tertib administrasi maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1470);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,




KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : SEK-14.KP.03.04 TAHUN 2023
 TANGGAL : 02 Maret 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	ADELIA IVANI, A.Md.Ak. NIP 200010112022032001	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	0
2.	ADISINTYA SEKARMEGA, A.Md. NIP 199704272022042005	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	0
3.	AL WILGA FILIA, A.Md. NIP 199506192022032003	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	0
4.	AMELIA KHOIRUNNISA, A.Md.A.K.P. NIP 199904102022032006	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	0
5.	ANINDYA PUTRI SHOLIHATUN, A.Md.Ak. NIP 199908182022032004	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	0
6.	ANISSA KAMILIA NUGRAHENI, A.Md.Ak. NIP 199909272022032002	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	0
7.	ASMAYANTI, A.Md. NIP 198905302022032001	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	0
8.	AYU RISMA DWININGSIH, A.Md.E. NIP 200009082022032002	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	0
9.	DADANG KURNIAWAN PUTRA, A.Md.Ak NIP 199702282022031005	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	0
10.	DEDEN YANYAN HERMAWAN, A.Md. NIP 199103262022031001	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	0
11.	DITO MARDIAN, A.Md. NIP 199703102022031004	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	0
12.	DWI NUZULLITA BUMILLITON, A.Md. NIP 199801152022032006	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	0
				13. . .

1	2	3	4	5
13.	FADILLA RATNA PRATIWI, A.Md.Bns. NIP 199710142022032004	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku	0
14.	GRACE ASIMA LUSYANA PASARIBU, A.Md. NIP 199904292022032007	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	0
15.	INDAH BELA PRATIWI, A.Md.Ak. NIP 200003312022042002	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	0
16.	INTAN SARI KUSUMA, A.Md.Ak. NIP 199712302022032006	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	0
17.	JIHAN KHAERUNISSA, A.Md.Ak. NIP 200001142022032002	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	0
18.	LUTHFI DIAH HAPSARI, A.Md. NIP 200010162022032003	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	0
19.	MAR'ATUL AZKIAH, A.Md. NIP 199604072022032006	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	0
20.	NIKEN PURWOSARI, A.Md.Ak. NIP 200111212022032001	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	0
21.	NOVRY DWIYANI, A.Md.Ak. NIP 199911082022032002	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	0
22.	PRAMUDETA ANDHY PUTRA, A.Md. NIP 199309102022031003	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	0
23.	RAFI GHANI AMANULLAH, A.Md.M. NIP 199907122022031004	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	0
24.	RENANDA RAMADELA MAYOLI, A.Md.M. NIP 200012222022032003	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	0
25.	ROSA DWI FANANI, A.Md. Bns. NIP 199609232022032006	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	0
				26 . . .

1	2	3	4	5
26.	ROSIANA PATAWARI, A.Md. NIP 198611222022032002	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	0
27.	RR. FAQIH AULIA RAHMAH, A.Md.E. NIP 199904292022032008	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	0
28.	SAFINA MAURILLA, A.Md.Ak. NIP 200105092022032001	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	0
29.	SASHA CANDHA JZAZILLI, A.Md.Ak. NIP 199907152022032005	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	0
30.	TANTINAH, A.Md.Ak. NIP 200010042022032001	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	0
31.	TUNJUNG ARI ADI, A.Md.M. NIP 200001072022031002	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	0
32.	YUSTIKA FAELLA SHUFA, A.Md.M. NIP 200001242022032001	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	0

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Andap Budhi Revianto', written over a horizontal line.

KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H